

ISSN : 1907 - 3739

Padang, 9 November 2013



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN VOKASI

Tema :

**“Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Vokasi
Dalam Perspektif Kurikulum 2013”**

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

PKMB 2005 ©

First Datarang

Second Datarang

Third Datarang

Fourth Datarang

Fifth Datarang

Sixth Datarang

Seventh Datarang



UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Prosiding

SEMINAR NASIONAL

Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Vokasi
Dalam Perspektif Kurikulum 2013

Axana Hotel Padang, 9 Nopember 2013

Tim Penyunting artikel:

Prof. H. Ganefri, M. Pd, Ph.D
Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed
Prof. Dr. Ramlee Mustopha
Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si.
Drs. Syahril, ST, MSCE, Ph.D
Dr. M. Giatman, MSIE.
Hendri Nurdin, MT
Rifelino, S.Pd., MT

Prosiding Seminar Nasional *Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Vokasi
Dalam Perspektif Kurikulum 2013*

Di selenggarakan oleh

Fakultas Teknik

Universitas Negeri Padang

Padang, 2013

Diterbitkan oleh :

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka Air tawar Barat, Padang

25131

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga prosiding ini dapat diselesaikan. Prosiding ini merupakan kumpulan makalah dari peneliti, dosen, guru dan praktisi yang berkecimpung di bidang pendidikan kejuruan yang berasal dari seluruh Indonesia. Kumpulan makalah ini telah di presentasikan pada kegiatan seminar yang di laksanakan pada tanggal 9 Nopember 2013 yang di selenggarakan di Axana Hotel - Padang.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pendidikan pada bidang teknologi kejuruan dalam perspektif kurikulum 2013 yang dapat diaplikasikan pada penelitian dan pengembangan sistem pendidikan kejuruan di Indonesia, dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan teknologi dan kejuruan. Publikasi hasil penelitian dalam rangka menyebarkan hasil kajian serta berbagi pengetahuan antar elemen pelaksana pendidikan kejuruan secara bersama, maka seminar ini penting untuk diselenggarakan.

Tujuan utama seminar ini adalah untuk mengembangkan model pembelajaran pendidikan vokasi *multi-entry-exit system* yang berorientasi pada kurikulum 2013. Selain itu memperdalam kajian pendidikan kejuruan serta penerapan teknologi dan informasi pada guru, dosen maupun masyarakat secara umum sebagai upaya menciptakan pemahaman secara bersama. Pola penerapan penelitian tindakan kelas, penerapan metode penelitian dan pengembangan proses pembelajaran, serta pengelolaan pendidikan teknologi dan kejuruan secara umum, sehingga dapat meningkatkan kualitas kompetensi peserta didik yang berorientasi pada kurikulum 2013.

Melalui kesempatan ini panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya seminar ini. Kepada seluruh pemakalah dan peserta seminar, diucapkan terima kasih atas pertisipasinya dan selamat berseminar semoga sukses.

Hormat kami

Prof. H. Ganefri, Ph.D

**REPOSISI DAN INOVASI PENDIDIKAN KEJURUAN DI INDONESIA
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU LULUSAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

Arwizet K

Teknik Mesin FT UNP Padang
e-mail: arwizet@yahoo.com

Abstrak

Pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan tertentu. Akan tetapi persoalan yang muncul adalah kurang siapnya lulusan untuk memasuki dunia kerja. Hal ini disinyalir disebabkan oleh kurangnya kompetensi lulusan untuk memasuki dunia kerja dan tidak sesuai profil lulusan dengan tuntutan dunia kerja. Selain itu juga terjadinya ketidak-seimbangan antara jumlah lulusan dengan lapangan kerja (supply and demand). Persoalan lain juga kurangnya minat siswa lulusan sekolah menengah tingkat pertama yang berprestasi untuk masuk ke sekolah menengah kejuruan. Input yang tidak bagus tentu akan sulit melahirkan lulusan yang bermutu. Untuk mengatasi kondisi ini sudah seharusnya pendidikan kejuruan melakukan reposisi dan inovasi terhadap sistem pendidikan yang selama ini di jalankan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menyampaikan beberapa langkah dalam melakukan reposisi dan inovasi di bidang pendidikan kejuruan. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan suatu keharusan dilakukan dalam bidang pendidikan terutama pendidikan kejuruan yang akan melahirkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja. Lulusan yang bermutu tentu akan siap memasuki dunia kerja sesuai dengan kompetensi yang mereka dapatkan selama mereka belajar di sekolah menengah kejuruan.

Keywords: *Sekolah kejuruan, supply dan deman, reposisi, inovasi, dunia kerja*

A. Pendahuluan

Sumber daya manusia (*human resources*) merupakan bagian yang sangat menentukan keberhasilan sebuah bangsa disamping sumber daya alam (*natural resources*). Sumber daya alam yang melimpah tanpa dikelola dengan baik, tidak mempunyai banyak arti dalam membangun suatu bangsa menjadi bangsa yang sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Hal ini dapat dibuktikan dimana negara Singapura, Jepang dan Korea, secara sumber daya alam negaranya sangat minim tetapi dengan unggul sumber daya manusianya maka Singapura, Jepang

dan Korea tergolong sebagai negara maju. Sumber daya manusia yang bermutu tentu akan dilahirkan oleh system pendidikan yang bermutu pula.

Dalam era globalisasi ini, mutu pendidikan merupakan masalah yang dijadikan agenda utama untuk diatasi dalam kebijakan pembangunan pendidikan, karena hanya dengan pendidikan yang bermutu akan diperoleh lulusan bermutu yang mampu membangun diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Banyak negara telah mulai menyadari arti pentingnya akan sumber daya manusia yang berkualitas atau tenaga terampil. Seperti diketahui mereka-mereka yang akan terlibat langsung dalam proses produksi. Tenaga terampil sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan industrialisasi suatu bangsa. Dengan demikian bangsa Indonesia harus tanggap menyikapi kondisi ini, karena tenaga terampil merupakan kunci unggul dalam persaingan global suatu bangsa. Apalagi perubahan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 menuju ke arah perekonomian global yang bebas, ketat dan penuh persaingan yang tajam. Untuk itu dituntut perusahaan dan industri agar mampu bersaing dengan perusahaan dan industri sejenis dari negara lain di dunia.

Pendidikan kejuruan (*vocational education*) merupakan program strategis untuk menyediakan tenaga kerja terampil pada tingkat menengah. Namun kenyataan menunjukkan bahwa program ini kurang menarik perhatian kebanyakan orang tua dan anak-anaknya, terutama dari golongan ekonomi menengah ke atas. Demikian juga siswa yang prestasi akademiknya tinggi cenderung tidak memilih pendidikan kejuruan. Mereka lebih cenderung masuk ke pendidikan umum dengan harapan lebih mudah memasuki jenjang pendidikan tinggi.

Hal ini sangat merugikan bagi sekolah kejuruan tingkat menengah karena yang masuk ke SMK lebih banyak dari kalangan siswa yang secara prestasi lebih rendah dan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Input yang tidak bermutu, sudah dapat dipastikan sulit melahirkan lulusan yang bermutu.

Usaha untuk menarik minat masyarakat (orang tua calon siswa SMK) dan remaja lulusan pendidikan menengah pertama, untuk memasuki sekolah kejuruan

(SMK) memang perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Usaha tersebut tidak cukup hanya dengan melakukan promosi dengan misalnya mencetak dan menyebarkan informasi. Tetapi pendidikan kejuruan harus mereposisi dan menginovasi sistem pendidikan sehingga pihak SMK dapat terlebih dahulu menunjukkan mutu lulusan yang mampu bersaing dan berdayaguna didunia kerja. Perlu juga menjadi catatan bahwa hampir 80 persen tenaga kerja di lapangan adalah tenaga kerja tingkat menengah ke bawah. Untuk itu peningkatan dan pengembangan pendidikan kejuruan ke arah penciptaan lulusan yang bermutu merupakan hal yang sangat penting dan diharapkan.

Menyikapi kondisi tersebut di atas, makalah ini bertujuan untuk mengungkapkan perlunya pendidikan kejuruan untuk mereposisi dan menginovasi dirinya agar mampu menjawab tuntutan persaingan di pasar regional dan global sangat diperlukan.

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah konsep pendidikan kejuruan?
2. Bagaimanakah model penyelenggaraan pendidikan kejuruan?
3. Bagaimanakah karakteristik dan kondisi pendidikan kejuruan?
4. Bagaimanakah langkah-langkah reposisi dan inovasi pendidikan kejuruan?

C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui konsep, model, karakteristik dan kondisi pendidikan kejuruan di Indonesia serta langkah-langkah dalam mereposisi dan inovasi pendidikan kejuruan agar mampu melahirkan lulusan yang siap memasuki dan bersaing di dunia kerja

D. Manfaat

1. Mengetahui konsep pendidikan kejuruan yang melahirkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja
2. Mengetahui model penyelenggaraan pendidikan kejuruan di Indonesia

3. Mendapatkan rumusan langkah-langkah dalam rangka reposisi dan inovasi pendidikan kejuruan

E. Pembahasan

1. Pendidikan Kejuruan

Menurut Rupert Evans (1978) dalam Djojonegoro (1997) pendidikan kejuruan merupakan *bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan lainnya*. Ini berarti satu bidang studi dipelajari lebih mendalam dari pada bidang studi lainnya sebagai bekal memasuki dunia kerja.

Menurut *United States Congress* (1976) dalam Djojonegoro (1997) pendidikan kejuruan adalah: *program pendidikan yang secara langsung dikaitkan dengan penyiapan seseorang untuk suatu pekerjaan tertentu atau untuk persiapan tambahan karier seseorang*. Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan untuk memasuki dunia kerja.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah yaitu: Pendidikan Menengah Kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan peserta didik untuk pelaksanaan jenis pendidikan tertentu. Pendidikan kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 15 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Pendidikan kejuruan adalah merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Menurut Thomson (1973), Evans (1978), Calhoud (1976), Marlan (1990), Silberman (1970) dalam Aljufri (2005) mengatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang menghubungkan, menjodohkan, melatih manusia agar memiliki kebiasaan bekerja untuk dapat memasuki dan berkembang pada dunia kerja (industri) sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki kehidupannya.

Di luar negeri pendidikan kejuruan muncul dalam bentuk: *Vocational Education, Cooperative education, Career education, Experience education, Occupational education, Distributive education, Technical education dan Training* Semua pengertian di atas perlu di dudukan satu persatu secara jelas, agar pemahaman tentang pengertian pendidikan kejuruan tidak menjadi rancu.

Akan tetapi, meskipun pengertian dan bentuk pendidikan kejuruan muncul dalam berbagai definsi dan wujudnya, secara umum pengertian dari pendidikan kerjuruan pada prinsipnya memiliki kesamaan yakni pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didiknya untuk memasuki dunia kerja.

2. Kurikulum Pendidikan Kejuruan (*Vocational Education Curriculum*)

Secara garis besar kurikulum pendidikan kejuruan di susun ke dalam komponen yang bersifat: a) Normatif, b) Adaptif dan c) Produktif.

Ketiga komponen kurikulum di atas pada hakekatnya tidak bisa dipisah, dan merupakan satu kesatuan yang utuh agar *output* dari pendidikan kejuruan tidak hanya bisa bekerja tetapi juga mempunyai perilaku yang baik, berwawasan serta mampu beradaptasi dengan lingkungan dimana dia bekerja.

Komponen normatif adalah kurikulum yang berperan dalam pembentukan watak manusia, bagaimana ia harus bersikap dan bertingkah laku yang baik; komponen adaptif adalah komponen kurikulum yang berperan menanamkan dasar-dasar pengembangan profesi, bagai-mana siswa mempunyai kemampuan mengembangkan wawa-san, beradap-tasi dengan dunia kerja atau ling-kungannya. Komponen produktif memuat bahan kajian dan pelajaran yang membekali keterampilan dan sikap kerja profesional sesuai dengan kemampuan yang dituntut oleh dunia kerja. Bahan kajian dan pelajaran yang mendukung penguasaan keterampilan produktif dan sikap kerja profesional diberikan melalui pelatihan untuk mandiri.

Sekolah menengah kejuruan (SMK) dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan serta kebutuhan dunia kerja dengan tidak mengurangi materi kurikulum yang berlaku secara nasional.

3. Dasar-Dasar dari Pendidikan Kejuruan

a. Asumsi Demokrasi (*Democratic Assumptions*)

- Setiap orang punya kebebasan dan harga diri serta mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya.
- Demokratik diartikan juga sebagai kebebasan (*liberty*) dan kesamaan hak untuk mendapatkan akses pendidikan.

b. Asumsi Dunia Kerja

- Pendidikan kejuruan adalah pendidikan ekonomi sebagai penghubung dunia pendidikan ke pasar kerja, dengan demikian akan memberikan kontribusi dalam memperkuat ekonomi nasional.
- Pendidikan kejuruan dapat menghasilkan pasar tenaga kerja yang profesional.
- Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang dapat mempengaruhi ekonomi dan sosial.
- Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang memusatkan perhatian kepada persiapan terhadap individu untuk pekerjaan awalnya.
- Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan kemampuan komunikasi peserta didik (*komunikasi = realita, masa depan, dan hubungan sosial*).
- Pendidikan kejuruan mengevaluasi dasar-dasar efisiensi ekonomi.

F. Model Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan di Indonesia

Model pendidikan kejuruan yang biasa diterapkan di negara-negara maju paling sedikit adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan Kejuruan Model Sekolah

Pendidikan kejuruan model sekolah dimana pemberian pelajaran (umum, kejuruan dan nilai/ norma /sikap) sepenuhnya dilaksanakan di sekolah. Menurut para ahli model ini dianggap kurang mampu menjaga relevansi, kurang mutakhir dan konservatif). Menurut ahli ekonomi ketenagakerjaan dari Bank Dunia, George Psacharopolopous (1994) dalam Djojonegoro (1997) menganjurkan agar praktek

kejuruan dilaksanakan di tempat kerja (dunia kerja), karena sumber daya di luar sekolah terutama di dunia kerja lebih canggih, lebih berkualitas, lebih nyata dan tidak abstrak, lebih kontekstual dan lebih relevan.

2) Pendidikan Kejuruan Model Sistem Ganda

Pendidikan kejuruan model ini mengkombinasikan pemberian pengalamanan belajar di sekolah dan pengalaman kerja sarat nilai di dunai kerja. Model ini menganggap bahwa kombinasi pembelajaran di sekolah dan pengalaman kerja di dunia kerja akan memberikan pengalaman lebih bermakna, karena yang diajarkan telah dikemas menjadi bahan pelajaran yang sistematis, terpadu dan lebih konkret. Model ini telah banyak dipraktikkan di bebarapa negara maju seperti di Jerman, Swiss dan Austria. Tamatan model ini umumnya memiliki kemampuan kerja yang berkualitas tinggi.

3) Pendidikan Kejuruan Model Magang

Pendidikan kejuruan tipe ini menyerahkan sepenuhnya kegiatan pelatihan kepada dunia kerja tanpa dukungan sekolah. Pendidikan kejuruan sendiri baru dilakukan pada tingkat Politeknik (setelah tamat sekola menengah). Model seperti ini kurang mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil tingkat menengah. Model ini banyak di laksanakan di Amerika Serikat.

4) Pendidikan Kejuruan dengan Model “*School Base Interprise*”

Model kejuruan ini di Indonesia disebut dengan unit produksi. Model ini pada dasarnya adalah mengembangkan dunia usaha di sekolahnya dengan maksud untuk menambah penghasilan sekolah dan juga untuk memberikan pengalaman kerja yang benar-benar nyata pada peserta didiknya. Model ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan sekolah kepada Industri dalam pemberian latihan kerja. Sebenarnya masih banyak sistem pendidikan kejuruan lainnya, namun semuanya bermuara sama yaitu: “*pendidikan kejuruan berbasis pengalaman kerja*”, sebagai alternatif yang paling menjanjikan.

Pengalaman Jerman bertahun-tahun dalam menyelenggarakan Pendidikan Sistem Ganda (PSG), terbukti 73% generasi muda yang memasuki sistem ganda

mereka setelah luluslangsung menjadi tenaga kerja terampil yang berkualitas tinggi. Bahkan sebelum tamatpun siswa telah produktif.

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pada dasarnya mengandung dua prinsip utama, yaitu:

- 1) Program pendidikan kejuruan adalah program bersama (*joint program*) antara SMK dengan dunia kerja/dunia industri pasangannya. Prinsip ini merupakan konkritisasi peralihan dari *supply demand* ke *deman driven*. Peralihan dalam arti kewenangan dan tanggung jawab secara sepihak oleh Departemen Pendidikan ke arah kebersamaan dan tanggung jawab bersama dengan pihak yang berkepentingan dengan pendidikan kejuruan.
- 2) Program pendidikan kejuruan dilakukan di dua tempat. Sebagian program yaitu teori dan praktek dasar kejuruan dilaksanakan di sekolah dan sebagian lainnya dilakukan di dunia kerja, yaitu keahlian produktif yang diperoleh melalui kegiatan bekerja di dunia usaha.

Pola penyelenggaraan pendidikan di dua tempat ini akan memaksa sekolah kejuruan mendekatkan dirinya ke dunia kerja, menyesuaikan konten kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja untuk mempermudah transfer nilai-nilai dan perilaku kerja sebagaimana yang berlaku di dunia kerja.

G. Karakteristik Pendidikan Kejuruan

Beberapa karakteristik pendidikan kejuruan antara lain:

- 1) Pendidikan kejuruan di arahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki dunia kerja.
- 2) Pendidikan kejuruan di dasarkan atas *demand driven* (*kebutuhan dunia kerja*).
- 3) Fokus isi kurikulum pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan dunia kerja.
- 4) Penilaian yang terhadap kesuksesan peserta didik harus pada “hands on” atau performa dalam dunia kerja.
- 5) Hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan kejuruan.

- 6) Pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi.
- 7) Pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada “learning by doing dan hands on experience”.
- 8) Pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktis.
- 9) Pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar daripada pendidikan umum.

Melihat karakteristik pendidikan kejuruan di atas, dimana pendidikan kejuruan mempersiapkan peserta didik memasuki dunia kerja, menekankan pada “*learning by doing* dan *hands on experience*” memerlukan fasilitas yang mutakhir yang akan sulit untuk dipenuhi oleh sekolah kejuruan, maka kerjasama/kolaborasi dengan dunia kerja mutlak diperlukan.

H. Kondisi Pendidikan Kejuruan

Dalam kondisi krisis multidimensi sekarang sebenarnya perlu dipertanyakan apakah masih perlu pendidikan kejuruan?.

Menurut Aljufri (2006), sebelum krisis (1996) dengan tingkat pertumbuhan ekonomi hampir 8 persen, tenaga kerja yang baru diserap 3,8 juta orang. Artinya ada 425 ribu lapangan kerja untuk tiap persen pertumbuhan ekonomi. Sementara itu pada tahun 2002 lalu dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 3,7 persen, lapangan kerja baru yang tersedia hanya 840 ribu atau hanya rata-rata 220 lapangan kerja untuk tiap persen pertumbuhan ekonomi.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik, tambahan angkatan kerja baru setiap tahun di Indonesia mencapai 2-2,25 juta orang. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi diperkirakan 3-4 persen, jelas bahwa Indonesia akan kesulitan menurunkan angka pengangguran. Menurut proyeksi Bappenas, jumlah pengangguran terbuka akan terus meningkat. Tahun 2006 angka pengangguran mencapai 10,1 juta jiwa dan tahun 2007 naik menjadi 10,8 juta.

Lebih parah lagi, kualitas penyerapan tenaga kerja juga terus merosot, hal ini dipicu oleh banyaknya investor asing yang keluar dari Indonesia. Ancaman pengangguran betul-betul serius, dan ini bagaikan batu karang yang terjal yang

setiap saat dapat membuat kapal Indonesia menjadi bocor, bahkan tenggelam (Mar'ie Muhammad, 2003) dalam Aljufri (2006).

Tambahan lagi, *operating cost* sekolah kejuruan jauh lebih mahal dari sekolah umum, menurut *role of thumb unit cost* lulusan pendidikan kejuruan sekitar sepuluh kali lebih besar dari pendidikan umum. Sedangkan ironinya mereka yang masuk ke sekolah kejuruan adalah mereka dari kalangan yang kurang mampu. Dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa pendidikan kejuruan tentu akan sangat tergantung dari keuangan negara. Makin kecil keuangan negara dikucurkan ke pendidikan kejuruan maka tidak mungkin dapat meningkatkan mutu pendidikannya. Maka suatu hal yang mustahil untuk dapat memetakan mutu pendidikan kejuruan di Indonesia setara dengan mutu pendidikan kejuruan di negara-negara maju. Alangkah baiknya kalau memperkecil *enrollment* sekolah kejuruan, tetapi meningkatkan mutu lulusannya.

Menurut Shasha Suandana (2005) ada dua departemen yang menjadi penanggung jawab utama dalam pengembangan sumber manusia (SDM) pelaksana pendidikan kejuruan, yaitu Departemen Pendidikan Nasional yang menangani pendidikan formal dan Departemen Tenaga Kerja yang menangani pelatihan (BLK). Akibatnya wadah peran serta masyarakat terbagi pula atas dua lembaga yaitu; MPKN (Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional) dan DLKN (Dewan Latihan Kerja Nasional) Kondisi ini dipandang tidak efisien dan menimbulkan keracuan di masyarakat. Oleh karena itu demi kepentingan nasional, kedua lembaga ini hendaknya digabung menjadi satu lembaga baru yang mampu menangani pendidikan dan pelatihan profesi secara terintegrasi. Dalam implementasinya dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak antara lain Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

H. Reposisi dan Inovasi Pendidikan Kejuruan Indonesia

Secara umum reposisi dan inovasi pendidikan kejuruan bertujuan untuk menata sistem pendidikan kejuruan di setiap wilayah/daerah dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengacu kepada

kecenderungan kebutuhan pasar kerja (*work market trend*) baik secara regional, nasional maupun global.

Sedangkan tujuan khusus inovasi atau reposisi pendidikan kejuruan adalah sebagai berikut:

- Menata ulang (*re-engineering*) sistem pendidikan kejuruan agar terbentuk sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan yang *permeable* dan fleksibel serta mampu menghasilkan SDM yang berkualitas.
- Menata ulang SMK agar menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM wilayah/daerah, agar pada gilirannya dapat berkembang menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Terpadu.
- Meningkatkan mutu tamatan (*output*) pendidikan kejuruan, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang dapat di sertifikasi baik secara nasional maupun internasional.

Manfaat yang dapat diperoleh melalui reposisi dan inovasi pendidikan kejuruan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Para pengambil keputusan di wilayah/daerah dapat memahami dengan baik tentang kondisi, permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi berkenaan dengan permasalahan pendidikan dan ketenagakerjaan di wilayah/daerah masing-masing.
2. Setiap wilayah/daerah memiliki perencanaan pembangunan SDM yang terprogram menjelang 2020 untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menjawab tantangan era global.

I. Arah Kebijakan Reposisi dan Inovasi Pendidikan Kejuruan Menjelang 2020

Arah kebijakan pendidikan kejuruan menjelang tahun 2020 dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menata ulang (*re-engineering*) pendidikan kejuruan melalui pengembangan sistem pendidikan yang *permeable* dan fleksibel serta pembelajaran berbasis kompetensi (*competency based training*).

2. Menata ulang (*re-engineering*) SMK agar secara bertahap memiliki kekuatan dan komitmen untuk berperan sebagai Pusat Pelatihan Kejuruan Terpadu (PPKT).

J. Peran Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk melahirkan Guru SMK

Peran LPTK dalam pendidikan guru SMK dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menghasilkan tenaga kependidikan kejuruan yang profesional yang ditandai dengan karakteristik sebagai berikut:
 - Memiliki penguasaan materi subjek yang menjadi bidang spesialisasi.
 - Memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas.
 - Memiliki komitmen terhadap profesi.
 - Memiliki kemampuan bersaing dan beradaptasi.
2. Mengembangkan dan mengim-plementasikan IPTEK di bidang pendidikan kejuruan.
3. Melaksanakan pelatihan dalam jabatan (*inservice training*).
4. Sebagai pusat informasi dan desiminasi IPTEK di bidang pendidikan kejuruan.
5. Mengembangkan sumberdaya ma-nusia di dunia usaha dan industri.

Program pendidikan kejuruan disusun berlandasan beberapa pendekatan antara lain:

1. Program berbasis kompetensi (*competency-based education*).
2. Program berbasis industri (*indutrial-based approach*).
3. *Broad-based competency*.
4. *Community-based education* (pendidikan berbasis masyarakat).

K. Inovasi Pendidikan Kejuruan Yang Mungkin Dilaksanakan

Menurut Wardiman Djojonegoro (1997), ada beberapa inovasi pendidikan kejuruan yang mungkin dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- Perubahan sistem pendidikan ke sistem yang luwes dan menganut prinsip *multy entry, multy exit*.

- Membuka jurusan-jurusan baru yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan daerah dan dunia kerja/industri.
 - Memuculkan pendidikan kejuruan di sekolah umum (PTD di SMU)
 - Pematangan tenaga kependidikan kejuruan dengan melanjutkan ke jenjang pendidikan Spesialis I (setara S2) dan spesialis II (setara S3) dengan bekerjasama dengan Universitas terkait.
 - Adanya kerjasama yang erat antara SMK dengan perguruan tinggi.
 - Adanya kerjasama yang erat antara SMK dengan dunia industri/kerja atau *takeholder*.
 - Perubahan dari pendekatan supply driven ke demand driven.
 - Perubahan dari pendidikan berbasis sekolah ke sistem berbasis ganda.
 - Perubahan model pengajaran ke model pengajaran berbasis kompetensi.
 - Perubahan dari program dasar yang sempit program dasar yang mendasar, kuat dan luas.
 - Perubahan ke sistem yang mengakui keahlian yang diperoleh dari manapun.
 - Perubahan ke sistem baru yang mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan kejuruan secara terpadu.
 - Perubahan dari sistem terminal ke sistem berkelanjutan.
 - Perubahan dari manajemen terpusat ke pola manajemen mandiri (prinsip desentralisasi).
 - Perubahan pembiayaan ke swadana dengan subsidi pemerintah pusat
- Membuka jurusan-jurusan baru yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan daerah dan dunia kerja/industri.

L. Kerjasama (*Kolaborasi*) dengan Dunia Kerja

Pendidikan kejuruan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja/industri akan tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, keterlibatan dunia kerja harus dikembangkan dalam menetapkan berbagai standar keahlian, pengembangan kurikulum dan kebijakan pengelolaan sistem “*Pelatihan Berbasis Kompetensi (Competency Based Training)*” di Indonesia serta tindak lanjutnya.

Awal dari sistem pelatihan berbasis kompetensi adalah dengan pembentukan komite-komite industri sejenis yang selanjutnya akan bekerjasama dengan para instruktur dan guru kejuruan untuk mengembangkan seperangkat standar keterampilan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan nyata dunia kerja.

Manfaat sistem pelatihan berbasis kompetensi bagi dunia kerja:

- Pemberian bantuan susunan daftar keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja oleh dunia industri, akan menjamin apa yang diajarkan dalam pendidikan di sekolah akan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- Pengembangan standar kompetensi akan memudahkan dalam penilaian keterampilan bagi peserta didik yang magang di dunia kerja.
- Standar kompetensi menjadi ukuran mutu untuk sertifikat keterampilan yang diberikan kepada peserta didik. Pengusaha akan mengetahui apa arti sertifikat tersebut karena keterampilan tersebut karena keterampilan yang dikuasai dijelaskan dalam istilah-istilah yang sesuai dengan dunia kerja.
- Ada kesepadanan antara pelatihan on the job training (berlatih di tempat kerja) dan off job training (berlatih di luar tempat kerja) dan tidak menjadi persoalan dimana keterampilan itu diperoleh.

M. Berlatih di Tempat Kerja (*On the Job Training*)

Karena sebagian besar pekerjaan di dalam dunia kerja dapat dipelajari dalam periode waktu yang relatif singkat, maka metode *On the Job Training* digunakan secara luas. *On the Job Training* meliputi semua upaya melatih peserta didik di tempat kerja sesungguhnya. Metode ini memiliki keunggulan memotivasi peserta didik secara kuat karena pelatihan tidak dilaksanakan dalam situasi artifisial di dalam ruang kelas.

Penggunaan *On the Job Training* secara luas, tidak diragukan lagi karena banyak manfaat yang diperoleh dari metode ini. Beberapa manfaat yang ditawarkan oleh metode *On the Job Training* adalah:

- Peserta didik melakukan pekerjaan yang sesungguhnya, bukan tugas-tugas yang disimulasikan sehingga peserta didik memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan dan merelevansikan keahliannya dengan dunia kerja nyata.
- Peserta didik mendapatkan instruksi-instruksi dari karyawan senior atau penyelia yang berpengalaman yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga memperoleh masukan pengetahuan dari lapangan untuk memperluas wawasannya.
- Pelatihan dilaksanakan di dalam lingkungan dunia kerja yang sesungguhnya, di bawah kondisi normal.
- Pelatihannya informal, relatif tidak mahal dan mudah dijadwalkan.
- Pelatihan dapat menciptakan hubungan kerjasama antara peserta didik dan pelatih.
- Program ini sangat relevan dengan pekerjaan, biaya relatif rendah dan membantu memotivasi kinerja yang kuat bagi peserta didik.

Meskipun demikian, metode *On The Job Training* memiliki beberapa kelemahan antara lain:

- Pelatih mungkin tidak termotivasi untuk melatih atau memikul tanggung jawab untuk melatih sehingga pelatihan dapat menjadi asal-asalan (serampangan).
- Pelatih mungkin melaksanakan pekerjaan dengan baik, namun kurang memiliki kemampuan melatih peserta didik agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik.
- Pelatih mungkin tidak memiliki waktu untuk melatih dan menghapuskan elemen yang penting dari proses pelatihan.

N. Berlatih di Luar Tempat Kerja (*Off the Job Training*)

Berlawanan dengan *on the job training*, *off the job training* dilaksanakan pada lokasi yang terpisah. Program ini membekali mahasiswa dengan keahlian dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk melaksanakan pekerjaan pada waktu yang terpisah dari waktu kerja reguler. Kursus-kursus, workshop, seminar dan simulasi adalah contoh khas dari program *off the job training*.

Ada dua bentuk secara umum dari *off the job training*:

1. Program-program *in house*, yang dikoordinasikan oleh karyawan dunia kerja dan diselenggarakan di dalam fasilitas dunia kerja.
2. Program-program *off site* yang diadakan jauh dari tempat kerja dan disponsori oleh asosiasi profesional, institusi pendidikan atau konsultan pelatihan independen.

Off the Job Training menawarkan beberapa keunggulan diantaranya:

- Biaya pelatihan yang efisien karena berlatih secara berkelompok dan bukan secara individu.
- Pelatih biasanya adalah instruktur purnawaktu atau staf pelatih, kemungkinan lebih merupakan pelatih yang kompeten dibandingkan *on the job trainer* yang biasanya hanya mengorbankan sebagian kecil waktu mereka untuk melatih.
- Membuka wawasan peserta didik terhadap dunia kerja lain sehingga memungkinkan peserta didik untuk mempelajari metode-metode dan teknik-teknik baru disamping materi-materi yang disajikan selama program.

Meskipun terdapat beberapa keunggulan, metode *off the job training* ini juga memiliki beberapa kelemahan potensial yaitu:

- Tipe dari pelatihan ini kadang lebih bersifat teoritis dan mempunyai nilai praktis yang terbatas bagi peserta didik.
- Kecocokan tipe-tipe pelatihan ini dengan kebutuhan dunia kerja dinilai rendah.

O. Kesimpulan

Pembangunan suatu bangsa memerlukan sumber daya (*resources*), baik sumber daya alam (*natural resources*) dan sumber daya manusia (*human resources*). Sumber daya manusia lebih penting dalam memperkuat daya saing suatu bangsa dalam persaingan di dunia global. Jepang dan Korea, secara sumber daya alam negaranya sangat minim tetapi dengan unggul sumber daya manusianya maka Jepang dan Korea tergolong sebagai negara maju. Sumber daya

manusia yang berkualitas atau tenaga terampil sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan industrialisasi suatu bangsa. Dengan demikian bangsa Indonesia harus tanggap menyikapi kondisi ini, karena tenaga terampil merupakan kunci unggul dalam persaingan global.

Menyikapi kondisi tersebut di atas, maka pendidikan kejuruan dengan segenap inovasinya yang mampu menjawab tuntutan persaingan di pasar regional dan global sangat diperlukan. Perlu juga menjadi catatan bahwa hampir 80% tenaga kerja di lapangan adalah tenaga kerja tingkat menengah ke bawah. Maka sekali lagi peningkatan dan pengembangan pendidikan kejuruan merupakan hal yang sangat penting.

P. Daftar Pustaka

- Aljufri B. Syarif, (2008). *Standarisasi Kualitas Pendidikan Teknologi Kejuruan*. Proceeding Konvensi Nasional APTEKINDO III se Indonesia, Gorontalo
- Aljufri B. Syarif, (1998). *Analisis Kebutuhan Pengembangan FPTK-IKIP Padang dalam menghadapi era Persaingan Global*. Makalah Seminar Lokakarya Kurikulum FPTK IKIP Padang.
- Anonimous, (1997). *Keterampilan Menjelang 2020*. Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan di Industri, Jakarta.
- Anonimous, (1993). *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0490/U/1992 Tentang Sekolah Menengah Kejuruan*, DEPDIKBUD, Jakarta.
- Ibrahim, (1988). *Innovasi Pendidikan*, Dept. P & K Dirjen Dikti Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Jakarta.
- M.Yusuf Tuloti, (2008). *Peran Dunia Kerja Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kejuruan*. Proceeding Konvensi Nasional APTEKINDO III se Indonesia, Gorontalo.

Rogers, Everett M., (1995). *Diffusion of Innovations*, The Free Press, New York.

Sumarto dan Yadi Mulyadi, (2008). *Sertifikasi Lulusan pada Lembaga Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Proceeding Konvensi Nasional APTEKINDO III se Indonesia, Gorontalo

Yusufhadi Miarso, (2009). *Kajian Pemetaan Pendidikan Kejuruan*. UNJ, Jakarta

Wardiman Djojonegoro, (1997). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan*, DEPDIKBUD, Jakarta.